



PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PROPINSI DKI JAKARTA

OLEH

ARIF TRIHATMANTO

6605010077

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Sains Ekonomi
pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

DEPOK, 2008

ABSTRAK TESIS

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI JAKARTA

ARIF TRIHATMANTO

6605010077

Program Studi Ilmu Ekonomi

Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Klasifikasi : JEL : A20, B62, H52, H53

Kata Kunci : 1. Pengeluaran Pemerintah

2. Anggaran Pendidikan

3. Anggaran PPMK

4. Pertumbuhan Ekonomi

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran Pemerintah daerah kotamadya/kabupaten perkapita pada bidang pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah Kotamadya/ Kabupaten di Propinsi DKI Jakarta.

Dihipotesakan pada penelitian ini hasil yang positif dan signifikan, yang artinya peningkatan pengeluaran pemerintah perkapita pada bidang pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta. Dengan kata lain program pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Kotamadya/ Kabupaten tersebut, karena salah satu tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui peningkatan pendapatan perkapita.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah uji regresi panel data dengan menggunakan fixed effects untuk 6 kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, adapun variabel bebasnya adalah pengeluaran perkapita bidang pendidikan, pengeluaran perkapita bidang program pemberdayaan masyarakat kelurahan, tenaga kerja, serta investasi.

Hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah perkapita bidang pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan. Demikian juga dengan tenaga kerja dan investasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, hidayah dan limpahan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Pengaruh Anggaran Pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi DKI Jakarta**. Penulisan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Ekonomi pada Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dengan bantuan berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis hendak menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr . Jossy P. Moeis selaku dosen pembimbing yang telah banyak megorbankan waktu dan menyumbangkan pikiran serta memberi arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. Arindra A. Zainal dan Prof. Dr. Nachrowi D. Nachrowi selaku Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Yang telah banyak memberikan materi, inspirasi dan wawasan dalam bidang ekonomi.
3. Ibu Dr. Diah Widyawati selaku penguji yang telah banyak memberikan sumbang saran demi kesempurnaan tesis ini.
4. Ibunda, Istri dan anak-anak (Jihan dan Vina) yang sudah banyak berkorban demi selesainya studi penulis di Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terima kasih atas kesabaran dan doanya.

5. Kakak dan adik-adik tercinta, terima kasih atas dorongan semangat dan dukungan yang tak henti demi selesainya studi S-2
6. Rekan rekan angkatan kelas salemba sore angkatan 2005 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan untuk kesempurnaan tesis ini. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
7. Bapak DR. Ir. Margani Mustar, selaku Kepala Dinas Dikmenti Propinsi DKI Jakarta beserta jajarannya di Subdis Tendik, yang telah memberikan bea siswa kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada pihak-pihak yang telah disebutkan di atas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, waktu, dan tenaga yang ada. Oleh karena itu penulis menerima kritikan, saran, masukan serta penelitian lanjutan untuk kesempurnaan tesis ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amien.

Jakarta, Juli 2008

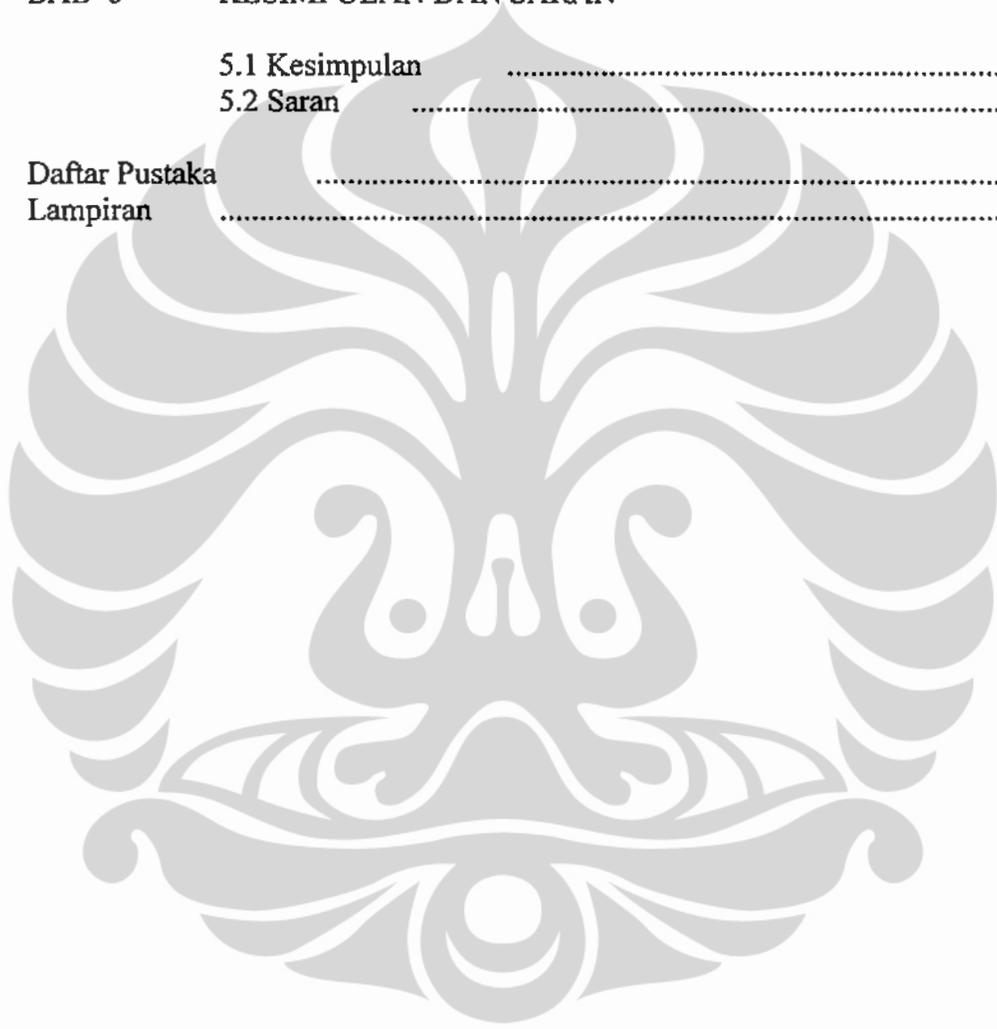
Penulis

Arif Trihatmanto

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Abstrak Tesis	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern	10
2.2 Pengertian dan Fungsi Anggaran	13
2.3 Pendidikan	17
2.4 Pemberdayaan Masyarakat	18
2.4.1. Pemberdayaan dan Pembangunan	19
2.5. Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah Bidang Pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.	24
2.5. Studi Terdahulu	27
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Model	31
3.2 Deskripsi Variabel dan data Penelitian	33
3.3 Metode Estimasi Model	34
BAB 4 HASIL REGRESI DAN ANALISIS	
4.1 Perekonomian Jakarta	39

4.1.1. Struktur Perekonomian Jakarta	39
4.1.2. Pendapatan Per Kapita	42
4.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	43
4.2. Realisasi Pengeluaran Sektor Publik Pemerintah Daerah Kotamadya/ Kabupaten pada Bidang Pendidikan dan PPMK ...	44
4.3. Deskripsi Statistik dan Variabel-variabel dalam Model ..	46
4.4. Hasil Pengujian Model	46
4.5. Hasil Analisis Regresi Kotamadya/ kabupaten	49
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
Daftar Pustaka	57
Lampiran	60

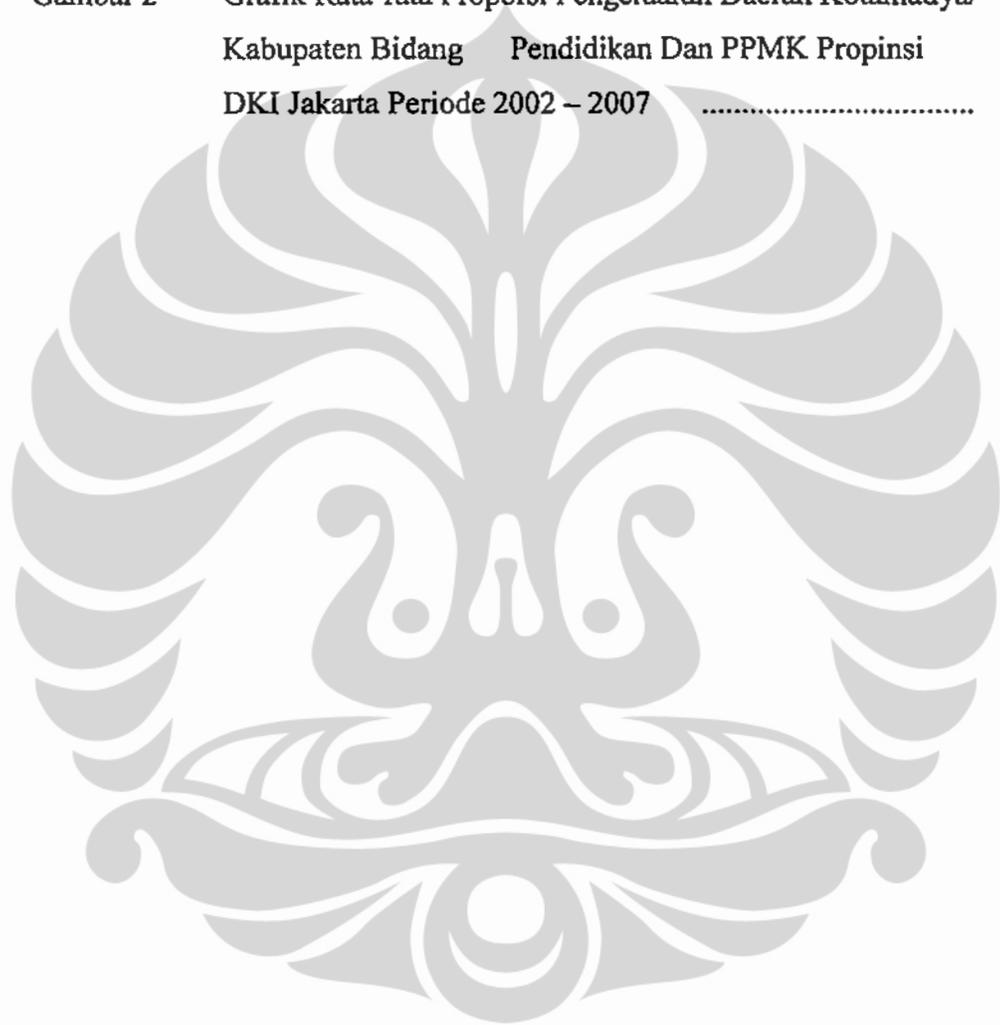


Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 3.1 Deskripsi Variabel dan Sumber Data	33
Tabel 4.1 Tabel Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2007 (Milyar Rp) ...	40
Tabel 4.2 Tabel Prouk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2002 – 2007 (Milyar Rp)	42
Tabel 4.3 Tabel PDRB dan Perubahan PDRB Per Kapita Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2002 – 2007.	43
Tabel 4.4 Deskripsi Statistik dari Variabel-variabel dalam Model	46
Tabel 4.5 Tabel Uji Chow atau Uji F	47
Tabel 4.6 Tabel Uji Hausman	48
Tabel 4.7 Tabel Uji LM atau Uji Heterokedastis	49
Tabel 4.8 Tabel Hasil Regresi Terhadap Model	50

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Propinsi, Kotamadya, dan Kabupaten DKI Jakarta, Tahun 2002 – 2007	44
Gambar 2 Grafik Rata-rata Proporsi Pengeluaran Daerah Kotamadya/ Kabupaten Bidang Pendidikan Dan PPMK Propinsi DKI Jakarta Periode 2002 – 2007	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai absolut maupun relatif. Secara absolut berarti dilihat dari perubahan PDB tahun lalu dengan tahun sekarang. Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas maka kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini, misalnya dilihat dari pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah.

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investment*) telah berkembang secara pesat, dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), sebenarnya pemikiran tersebut telah ada sejak jaman Adam Smith (1776), Heinrich Von Thunnen (1795) dan para teoritis klasik lainnya sebelum abad ke 19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia.

Schultz (1961) dan Deninson (1962) memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai faktor inti yang telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penemuan cara pandang ini

telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Hasil penelitian Hick (1980), Wheeler (1980) telah dapat meyakinkan akan pentingnya manusia yang terdidik menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung, bahkan seluruh sektor pembangunan makro lainnya.

Dalam kasus Indonesia, studi-studi regional yang ada juga lebih menekankan pada determinan pertumbuhan ekonomi dimana kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu variabel penjelasnya. Hal ini antara lain dilakukan oleh Garcia dan Soelistianingsih (1998) dan Wibisono (2001).

Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Berdasarkan hal itu dapat dikatakan bahwa antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi sebetulnya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk, dan konsekuensinya adalah juga pada produktifitas dan kreatifitas mereka.

Pendidikan sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Begitu pula, modal sosial akan meningkat seiring dengan tingginya pendidikan. Dengan kata lain, pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih meyakinkan jika memang sudah ada kebiasaan untuk mendukung pendidikan yang baik yang mana tergantung pada tahapan pembangunan itu sendiri. Selain itu, pengaruh

positif itu juga dapat terwujud jika terdapat tingkat investasi yang tinggi, distribusi pendapatan yang lebih merata, dukungan untuk modal sosial yang lebih baik, serta kebijakan ekonomi yang lebih memadai.

Ada beberapa studi yang mengkaji hubungan antara investasi pendidikan dengan pembiayaan atau pembelanjaan bidang tersebut dimana pembiayaan bidang pendidikan akan meningkatkan Net Enrolment Ratio sekolah dasar, sehingga akhirnya dapat meningkatkan akumulasi human capital untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana pendapatan beberapa penelitian seperti Gupta, et al (1997), Barro (1991), Chu et al (1995), Tanzi dan Chu (1998) dalam Utami (2007).

Sebaliknya kontribusi positif pendidikan dapat menyimpang dari teori ekonomi. Berbagai aspek yang kurang tepat menyebabkan kontribusi pendidikan tidak terlalu besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Kenaikan drastis dari tingkat pendidikan di negara-negara berkembang tidak menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi. Misalnya di Afrika, antara tahun 1960 hingga tahun 1985, pertumbuhan tingkat sekolah di benua itu tercatat lebih dari 4 persen per tahun, dan nyatanya ekonomi negara-negara di Afrika hanya tumbuh 0,5 persen pertahun. Sementara itu ada juga pendapat yang bertentangan dengan hasil penelitian di atas bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari peningkatan investasi bidang pendidikan terhadap *net enrolment ratio* sekolah dasar. Seperti Mingat dan Tan (1992) dan Flug et al (1998) dalam Utami (2007)

Empowerment atau 'pemberdayaan' adalah sebuah konsep yang membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan. sesuai dengan

keinginan mereka . Konsep pemberdayaan menjadi suatu upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memiliki visi “mewujudkan kemandirian masyarakat dalam membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan kondisi masyarakat Propinsi DKI Jakarta. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ibukota.

Studi mengenai implikasi kebijakan fiskal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan misalnya Brata dan Arifin (2003) yang mencoba menganalisa aspek fiskal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi di Indonesia, dan juga studi dengan perhatian yang hampir sama telah dilakukan oleh Rappaport (1999), Gupta et al. (2002) dalam Brata (2004)

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada bab IV pasal 7 dan 8, maka pemerintah DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas inisiatif dan prakarsa sendiri. Sesuai ketentuan undang-undang bahwa daerah mempunyai kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem

administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional.

Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut, maka pembiayaannya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan adanya desentralisasi fiskal tersebut maka secara otomatis setiap daerah berhak untuk mengatur pengeluaran anggaran dalam APBD sesuai dengan prioritas dan program pembangunan masing-masing daerah. Tidak ada ukuran seberapa besar masing-masing sektor pembangunan di daerah memperoleh proporsi anggaran. Dengan demikian hal ini tentunya berpengaruh juga terhadap pembangunan sumber daya manusia di masing-masing daerah, karena setiap daerah tidak sama dalam menentukan proporsi pembelanjannya untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal ini maka akan dikaji mengenai pengaruh anggaran pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah "Apakah anggaran pendidikan dan program pemberdayaan

masyarakat kelurahan pemerintah kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh anggaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh anggaran program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) terhadap pertumbuhan ekonomi kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara anggaran pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dasar bagi pemerintah maupun para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan kebijakan yang dapat memberikan dampak positif baik secara nasional, propinsi, kotamadya/ kabupaten, maupun bagi seluruh lapisan masyarakat dan agen-agen perekonomian.

1.5. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data pengeluaran pemerintah kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta pada bidang

pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan tahun 2002 – 2007, tenaga kerja dan investasi di kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta Data ini diperoleh dari APBD, Biro Keuangan, dan BPS Propinsi DKI Jakarta, Sakernas, dan SEKI Bank Indonesia.

Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan ekonometrik. Analisis deskriptif ditujukan untuk menganalisis dan menginterpretasikan dokumen-dokumen data dan sampel penelitian, dan analisis ekonometrik untuk menganalisis berhubungan dengan pengujian hipotesis.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis ini dapat dengan mudah dipahami, maka penulisan tesis ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, berisikan landasan teori dan studi empiris yang memaparkan mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, anggaran, pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan, serta kaitan antara pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Bab III, merupakan bab metodologi penelitian yang secara rinci memaparkan model ekonometri yang digunakan dalam penelitian ini. Bab IV, merupakan hasil analisis data dan interpretasinya. Bab V, merupakan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan perekonomian adalah laju dalam mana PDB (Produk domestik Bruto) riil mengalami kenaikan. Setiap kali mengacu pada pertumbuhan atau laju pertumbuhan tanpa menyebutkan hal-hal yang lain, sebetulnya kita sedang mengacu pada laju pertumbuhan PDB riil, seberapa besar perekonomian mengalami laju pertumbuhan rata-rata sebesar beberapa persen pertahun selama periode yang panjang. Dornbusch dan Fischer (1977).

Apa yang menyebabkan PDB (PDRB) tumbuh sepanjang waktu? Penyebab pertama pertumbuhan PDB (PDRB) riil adalah bahwa sumber daya yang tersedia di dalam perekonomian mengalami pertumbuhan. Secara sederhana sumber daya dibagi 2 yaitu tenaga kerja dan barang modal. Angkatan kerja mengalami pertumbuhan sepanjang waktu dan dengan demikian, menyediakan satu tambahan sumber daya bagi peningkatan produksi.

Demikian pula dengan cadangan barang modal, penyebab kedua perubahan PDB (PDRB) riil adalah akibat efisiensi faktor-faktor produksi mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dimana faktor produksi yang sama dapat menghasilkan lebih banyak output. Kenaikan efisiensi produksi ini dapat terjadi karena perubahan pengetahuan, termasuk *proses learning by doing* (belajar sambil berbuat).

Semua negara di dunia sepakat bahwa salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa, dapat digunakan nilai produk nasional bruto (PDB) per

kapita. Semakin tinggi produk national bruto per kapita semakin makmur negara yang bersangkutan. Menurut Todaro (1999) ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor utama tersebut adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal (*capital accumulation*) meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya modal. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar *output* atau pendapatan di kemudian hari.

Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja yang besar dapat menambah jumlah produksi suatu negara, pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya juga akan semakin besar. Namun positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung kepada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara efektif memanfaatkan pertambahan jumlah angkatan kerja tersedia.

Kebanyakan ekonom dan terutama kalangan teknokrat mengasumsikan bahwa kemajuan teknologi (*technological progress*) merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Pengertian yang paling sederhana bahwa kemajuan teknologi terjadi karena ditemukanya cara baru atau perbaikan terhadap cara-cara lama yang menangani pekerjaan secara tradisional.

Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masih menurut Arsyad, masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogeneous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Perkembangan atau pertumbuhan dari masing-masing sektor perekonomian ditentukan oleh berbagai sebab seperti ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurut Widodo (1990) transformasi struktural merupakan rangkaian perubahan dalam komposisi permintaan, perdagangan, produksi dan penggunaan faktor produksi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Menurut Boediono (1992) secara garis besar ada dua kelompok teori pertumbuhan, yaitu : teori klasik dan teori modern. Teori klasik terdiri dari teori Adam Smith, David Ricardo dan teori Athur Lewis. Selanjutnya teori pertumbuhan modern terdiri dari teori Neo Keynes yaitu teori Harrod - Domar, Neo Klasik dari Robert Solow hingga teori pertumbuhan ekonomi endogen.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi modern, terdapat beberapa teori yang menonjol, yang dikembangkan dari teori makro Keynes. Menurut Keynes, investasi merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi, kenaikan investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan mengkonsumsi.

Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan, oleh Keynes disebut dengan *multiplier*.

Teori pertumbuhan modern ini meliputi teori pertumbuhan neo klasik Keynes dari Harrod - Domard, teori Neo Klasik dari Robert Solow serta teori-teori lainnya. Mengingat banyaknya teori serta perkembangannya maka dalam penelitian ini hanya akan disinggung beberapa teori terutama yang terkait dengan kebutuhan kapital. Teori Solow akan dibahas kemudian Karena merupakan dasar teori yang digunakan oleh Romer untuk menjelaskan bagaimana peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Baik Sir Harrod maupun Evsey Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai dampak ganda yang dihasilkan oleh investasi. *Pertama*, investasi menciptakan pendapatan yang berikutnya berdampak terhadap permintaan agregat. *Kedua*, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal yang berdampak pula terhadap penawaran agregat. Todaro (1994).

Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa besarnya Pertumbuhan ekonomi akan sama dengan rasio antara kecenderungan marginal menabung dengan COR (*capital output ratio*). Teori di atas tidak dapat terpenuhi atau dengan kata lain terdapat *gap* antara keduanya. *Gap* inilah yang kemudian menjadi dasar bagi masuknya modal asing ke dalam negeri.

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen merupakan modifikasi dari model neo klasik, model ini dikenal juga dengan nama ekonomi pertumbuhan baru yang menekankan batasan pertumbuhan pada pertumbuhan terkini yang bersifat endogen. Teori ini dipelopori oleh Paul Romer (1986), Lucas (1988) dan Rebelo (1991). Oleh karena itu model pertumbuhan endogen dapat menerangkan bagaimana dan mengapa perekonomian tumbuh. Hal ini berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh teori pertumbuhan neoklasik dimana kemajuan teknologi bersifat eksogen seperti yang dinyatakan oleh Ramsey (1928), Solow (1956), Swan (1956), Cass (1965), dan Koopman (1965).

Titik krusial dari teori pertumbuhan endogen adalah adanya “produksi” teknologi baru dimana terdapat peran ilmu pengetahuan didalamnya, dan adanya modal manusia. Teori ini juga menyatakan kebijakan yang diambil dapat berpengaruh dalam jangka panjang terhadap perekonomian melalui penelitian dan pengembangan serta pendidikan. Teori ini mengasumsikan pertumbuhan dan pemerataan antara lain dicapai melalui kemampuan teknologi, dan perkembangan teknologi ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang menguasai atau menciptakannya. Dengan demikian unsur-unsur dasar untuk mencapai pertumbuhan sekaligus pemerataan adalah sumberdaya manusia, teknologi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Model pertumbuhan ekonomi pada teori pertumbuhan baru ini berkaitan erat dengan fungsi produksi agregat yang merupakan modifikasi dari fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai berikut :

$$Pertumb = F_T(L;K;H) \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana : L = tenaga kerja , K = modal fisik, H = modal manusia dan T = teknologi

Pada Barro,(1995) dalam (Baskoro; 2004) model pertumbuhan ini dimodifikasi dengan menggandakan L dan h (modal manusia untuk macam tenaga kerja) sehingga di dapat H baru model diatas menjadi :

$$Pertumb = F_T(K,H) \dots\dots\dots(2.2)$$

Modal fisik dan manusia tergantung pada investasi yang ditanamkan pada keduanya, dengan mengasumsikan bahwa teknologi konstan, maka modifikasi model diatas menjadi :

$$Pertumb = F_T(Penddk, PPMK, Naker, Invest) \dots\dots\dots(2.3)$$

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan IMF dalam (Baskoro, 2004) bahwa pada data beberapa negara berkembang dari tahun 1970 sampai 1990 menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara investasi dan tingkat pertumbuhan. Negara yang tingkat investasinya tinggi ternyata juga negara-negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi.

2.2. Pengertian dan Fungsi Anggaran

Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (*budget*) sebagai berikut

.....Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Menurut Suparmoko (2002) Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan pendapatan pada masa yang akan datang umumnya disusun untuk masa satu tahun. Anggaran juga berfungsi sebagai alat kontrol, atau pengawasan, baik terhadap pendapatan maupun pengeluaran pada masa yang akan datang.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari Pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah atau anggaran sektor publik sebagai berikut : 1) Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut; 2) Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah; 3) Keutuhan Anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum; 4) *Nondiscretionary*. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif; 5) Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik; 6) Akurat. Estimasi

anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat menyebabkan tidak efisiennya anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran; 7) Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan; dan 8) Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

World Bank (2002) menyebutkan bahwa dalam mencapai visi dan misi daerah, penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok yang meliputi komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediksi dan informatif

Adapun fungsi anggaran menurut Halim (2001) bahwa fungsi utama anggaran bagi pemerintah adalah sebagai alat perencanaan, alat kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik.

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk : a) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, b) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan, c) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan d) menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian kinerja.
- 2) Anggaran sebagai alat kebijakan digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena melalui anggaran pemerintah dapat diketahui arah kebijakan, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi

dan estimasi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi;

- 3) Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan terhadap prioritas tersebut, karena anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis, akan tetapi lebih merupakan alat politik.
- 4) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi hal ini terlihat dalam proses penyusunan anggaran, karena anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi, disamping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif, agar anggaran dilaksanakan.
- 5) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja sebagai wujud komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang (legislative), karena kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran, begitu pula pimpinan unit dinilai berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 6) Anggaran sebagai alat motivasi dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan,

selanjutnya agar dapat memotivasi pegawai seharusnya anggaran tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan SDM yang ada

- 7) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik maksudnya anggaran publik tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah, karena sekarang ini proses penganggaran pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban hasil kegiatan.

Dengan demikian anggaran adalah dokumen mengenai catatan perhitungan belanja penerimaan dan pengeluaran yang akan dipergunakan dengan jangka waktu yang ditentukan.

2.3. Pendidikan

Dewasa ini berkembang paling tidak tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata sosial. Menurut Romer (1996) modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan adalah suatu cara dimana individu meninggalkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. Karena modal manusia memiliki hubungan positif maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi.

Secara implisit, pendidikan menyumbang pada penggalian pengetahuan. Ini sebetulnya tidak hanya diperoleh dari pendidikan tetapi juga lewat penelitian dan pengembangan ide-ide, karena pada hakikatnya, pengetahuan yang sama sekali tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia adalah mubazir. Karenanya, aspek penelitian dan pengembangan menjadi salah satu agenda penting. Dengan demikian, peningkatan investasi di bidang pendidikan, tidak bisa dihindarkan.

Pemerintah DKI setiap tahun telah meningkatkan anggaran sektor pendidikan. Masalahnya, angka dan peningkatan ini secara absolut relatif sangat kecil, sehingga masih jauh bila dibandingkan negara-negara tetangga yang sangat serius dalam pengembangan sumber daya manusia

2.4. Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment yang berarti 'pemberdayaan' adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, terutama Eropa. Pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam perkembangannya, konsep pemberdayaan menjadi suatu upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, pemerintah, bangsa di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial, yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar secara regional maupun nasional yang sifatnya individual sekaligus

kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial.

Kartasmita (1995) mengemukakan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara : 1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang; 2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah; 3) memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan rakyat.

2.4.1 Pemberdayaan dan Pembangunan

Konsep “pemberdayaan” (*empowerment*) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini sering disebut sebagai perubahan paradigma atau serangkaian perubahan mulai dari tataran konsep, teori, nilai-nilai, metodologi, sampai ke tataran pelaksanaannya. Perubahan ini telah mempengaruhi isi Laporan

Indeks Pembangunan. Manusia (*Human Index Development*) yang setiap tahun dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Organisasi ini menyatakan “pembangunan seharusnya dirasakan oleh rakyat bukan sebaliknya dimana rakyat menjadi penonton pembangunan dan seharusnya pula pembangunan memperkuat rakyat bukan justru membuat rakyat semakin lemah”

Konsep pemberdayaan bukan semata-mata bagaimana memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Konsep ini berkembang dari banyak upaya para ahli dan praktisi untuk apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity.*” Konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan. Seperti dikatakan oleh Donald Brown (1995), bahwa keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “*incompatible or antihetical*”. Hal ini bertolak pada pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena program pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan karena program ini memberikan input sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjadi peningkatan kapasitas masyarakat, dan kemudian terjadi pemupukan modal masyarakat sebagai modal bagi pembangunan masyarakat itu sendiri.

Pandangan-pandangan yang berkembang dalam teori-teori pembangunan terutama di bidang ekonomi memang mengalir deras kearah manusia dan dalam

konteks plural kearah masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus sebagai pelaku pembangunan baik sebagai subyek maupun obyek

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi sekarang ini sudah banyak diterima bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur dunia. Pemikiran yang berkembang adalah bahwa pertumbuhan haruslah secara beriringan dan terencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan lebih merata. Hanya dengan demikian maka mereka yang miskin, tertinggal dan tidak produktif (yang di sebagian besar negara berkembang merupakan mayoritas penduduk) akan menjadi produktif, yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan itu sendiri. Strategi demikian dikenal dengan *redistribution with growth* yaitu sebuah konsep yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan melalui pemberdayaan masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat "*People-centered, participatory, empowering, and sustainable*". Chambers (1955).

Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh International Fund for Agriculture Development (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya yang lebih kecil, tetapi juga dengan devisa yang lebih kecil pula. Brown (1995).

Pemberdayaan menjadi konsep kunci untuk menanggapi kegagalan pelaksanaan pembangunan selama ini. Sejak dicanangkan konsep pembangunan

pada akhir masa perang dunia kedua, ternyata pembangunan membuat orang semakin miskin atau jumlah orang miskin semakin banyak. Gagasan modernisasi pun gagal karena tidak mampu meneteskan hasil-hasil pembangunan kepada kelompok masyarakat termiskin. Pemerintah ternyata tidak mampu mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan pembangunan ternyata juga merusak lingkungan hidup.

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengentasan kemiskinan sering dikaitkan dengan beberapa hal berikut:

- Tata relasi kekuasaan yang demokratis, transparan dan diakui publik (good governance).
- Transformasi ekonomi menjadi komunitas yang mandiri, berbasis pada sumberdaya lokal, dan penguatan sumberdaya manusia.
- Promosi pengembangan komunitas melalui kekuatan sendiri dan berporos pada proses dibandingkan dengan penyelesaian suatu proyek.
- Sebuah proses yang memungkinkan pengambilan keputusan kolektif dan dilanjutkan dengan tindakan kolektif
- Partisipasi penuh atau sebuah proses yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tanpa terkecuali) dalam pengembangan agenda komunitas.

Sesuai hal-hal di atas memperkaya proses pemberdayaan menjadi suatu kebutuhan dalam membangun kapasitas komunitas untuk mampu merespon perubahan lingkungan dengan cara mendorong perubahan internal dan eksternal yang sesuai dan tidak lelah melakukan pembaruan sosial (inovasi sosial). Pemberdayaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan harus menjadi proses

multidimensi dan multisegi yang memobilisasi sumberdaya dan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak lagi menjadi sesuatu yang teoritis.

Dalam kerangka pemikiran di atas, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan sesuatu atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Ketiga, dalam proses memberdayakan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Kartasmita (1995).

Pemikiran pembangunan alternatif menekankan pada transformasi politik, ekonomi, lingkungan hidup, kelembagaan sosial serta nilai-nilai komunitas melalui pemberdayaan. Pembangunan yang bertumpu pada komunitas hendaknya berakar pada prinsip-prinsip berikut:

1. Kedaulatan, kebebasan, dan demokrasi melalui partisipasi politik yang luas
2. Komunitas lokal mengontrol sendiri sumberdayanya dan memiliki akses memadai pada informasi
3. Membangun suatu sistem nilai yang konsisten sesuai dengan perikehidupan komunitas dan hubungan mereka dengan alam dan sumberdayanya.
4. Membangun semangat gotong royong di antara anggota komunitas untuk membangun masa depan bersama.

Penekanan terpenting dalam proses pemberdayaan dalam pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan sosio-ekonomi, pemberdayaan politik, pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan teknologi dan pemberdayaan kebudayaan atau spiritual. Pemberdayaan sosio-ekonomi ini akan

mendorong individu dan komunitas memperoleh tanggung jawab bersama untuk menentukan masa depannya dan menjadi manajer perubahan yang diinginkan.

2.5. Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah Bidang Pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Masalah yang sering kali dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola anggaran adalah prioritas antara investasi untuk infrastruktur ekonomi dan investasi untuk sektor pembangunan. Hal ini merupakan dilema karena investasi infrastruktur diperlukan untuk menunjang pertumbuhan. Demikian juga, dibutuhkan investasi pembangunan manusia yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori ekonomi makro yang bersandarkan pada peran pasar dalam alokasi sumberdaya dalam prakteknya terjadi kesenjangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Oleh karena itu diperlukan intervensi pemerintah yang tepat dalam proses pembangunan. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah melalui kebijakan anggaran pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan anggaran ini dapat memberikan input sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjadi peningkatan kapasitas masyarakat, dan kemudian terjadi pemupukan modal masyarakat sebagai modal bagi pembangunan.

Pemda DKI Jakarta dalam RENSTRADA 2002-2007 menyebutkan, pada tahun 2002-2004 sebagai tahun fase pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi atau disebut *recovery program*. Selanjutnya tahun 2005- 2007 mencanangkan tahun pemantapan sosial ekonomi yang disebut juga sebagai *stabilization program*. Dengan demikian prestasi yang dicapai tahun 2002-2007 diharapkan menjadi landasan yang

kuat untuk menuju fase berikutnya, yakni kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Angka pertumbuhan DKI Jakarta dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Pada tahun 2004 tercatat sebesar 5,24 persen, sedang tahun 2005 mencapai angka 5,78 persen. Pemda DKI terus mengupayakan terjadinya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemda DKI Jakarta dari tahun ke tahun berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan anggaran kesejahteraan masyarakat seperti anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK), hanya saja, dengan jumlah anggaran tersebut bukan berarti persoalan pendidikan sudah dapat ditanggulangi di wilayah DKI Jakarta. Seperti kasus-kasus di beberapa daerah lain, di wilayah DKI Jakarta masih banyak persoalan sekitar permasalahan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga pengajar yang kurang dibandingkan peserta didik dan ketersebaran yang tidak merata. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud.

Pemberdayaan masyarakat kelurahan juga masih dianggap kurang berhasil. Sejumlah dana yang digulirkan untuk memberdayakan masyarakat ternyata tidak mencapai sasaran. Sebagian masyarakat yang mendapat dana bantuan tidak mempergunakan dana tersebut untuk berusaha atau meningkatkan taraf ekonomi keluarga tetapi dipergunakan untuk kebutuhan yang kurang produktif.

Dengan demikian pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang komprehensif dari produktivitas pengeluaran

publik. Ada dua komponen yang diukur, yaitu kontribusi output sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dari pengeluaran baik dari besarnya maupun alokasi sektoralnya terhadap outputnya.

Kebutuhan akan peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah DKI Jakarta untuk bidang pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat menjadi semakin terasa semenjak masa pemulihan krisis ekonomi. Setelah berlakunya otonomi daerah, maka persoalan pentingnya investasi sektor publik untuk pembangunan bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sama pentingnya. Investasi pemerintah selama ini masih dititikberatkan pada bidang infrastruktur ekonomi dan belum memberikan perhatian yang memadai dalam bidang pembangunan manusia khususnya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Efisiensi dan efektifitas investasi sektor publik untuk kedua hal tersebut masih rendah. Brata dan Arifin (2003).

Untuk itu fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran daerah kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta dalam bidang pendidikan dan PPMK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah fokus yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh variabel tenaga kerja dan investasi di kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penelitian ini diperkirakan pengeluaran pemerintah daerah kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta dalam bidang pendidikan dan PPMK mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian juga dengan tenaga kerja dan investasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

2.6. Studi Terdahulu

2.6.1. Studi Barro and Sala-i-Martin (1995)

Barro and martin (1995) melakukan studi empirik tentang pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang selama periode 1965-1975, dan 1975-1985. variabel penjelas yang digunakan cukup banyak, yakni: GDP per kapita awal, pencapaian pendidikan, harapan hidup, interaksi antara GDP dan modal manusia, pengeluaran publik untuk pendidikan, rasio investasi, konsumsi pemerintah, pasar gelap BBM, instabilitas politik, dan term of trade.

Berkaitan dengan pencapaian pendidikan dengan menggunakan indikator tingkat pendidikan menengah dan tinggi untuk jenis kelamin laki-laki, hasil regresi memberikan nilai koefisien yang sangat signifikan. Dalam periode 1965-1975, setiap peningkatan satu standar deviasi sekolah menengah untuk laki-laki (0,68 tahun) dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1 persen pertahun, sedangkan untuk peningkatan satu standar deviasi pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan (0,091 tahun) laju pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 0,5 persen per tahun.

2.6.2. Studi Frank C. Lee (1996)

Lee (1996) dalam penelitiannya yang berjudul *Economic Growth of OECD Countries Forecasting on Canada*, memperoleh beberapa temuan menarik yaitu (1) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita mempunyai hubungan positif (+) dengan rasio investasi terhadap PDB, tetapi berhubungan negatif (-) dengan tingkat inflasi; (2) pertumbuhan penduduk dan besarnya pengeluaran pemerintah berdampak negatif (-) terhadap pertumbuhan ekonomi; (3) diantara negara-negara OECD terjadi konvergensi.

Tingkat partisipasi sekolah jenjang perguruan tinggi (*tertiary school enrollment ratio*) berdampak positif (+) terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel lain tetapi tidak signifikan adalah rasio hutang terhadap PDB, rasio defisit anggaran pemerintah terhadap PDB, rasio pengeluaran domestik untuk R & D terhadap PDB.

2.6.3. Studi Ramirez et al. (1998)

Studi Ramirez et al (1998) tentang "Economic Growth and Human Development", penelitiannya didasarkan kepada adanya asumsi hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pembangunan manusia dan pembangunan manusia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan ada dua mata rantai yang menghubungkan keduanya.

2.6.4. Studi Brata (2005)

Studi yang dilakukan oleh Brata (2005) yang mengkaji Peranan Investasi Sektor Publik Lokal, pembangunan Manusia dan Kemiskinan. Dalam studi tersebut diperoleh bukti empiris selama kurun waktu tahun 1970 sampai dengan 1990 an pertumbuhan ekonomi terus mendorong pemerintah untuk mengalokasikan pengeluaran untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial lainnya relatif lebih banyak. Namun bila dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial tersebut Indonesia masih jauh di bawah negara-negara Asean antara lain Malaysia dan Thailand.

Tujuan studi tersebut ada 2. Pertama, untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terutama di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat pembangunan manusia. Kedua, untuk memperoleh bukti empiris

hubungan antara tingkat pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan. Hasil studi tersebut diperoleh bukti bahwa investasi sektor publik di bidang sosial membawa manfaat bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk. Investasi bidang sosial tersebut menghasilkan manfaat dalam peningkatan indeks pembangunan manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan.

2.6.5. Studi Noegroho dan Soelistianingsih (2007)

Studi yang dilakukan oleh Noegroho dan Soelistianingsih (2007) 'Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui disparitas pendapatan kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional selama periode 1993-2005.

Dengan menghitung nilai entropi total Theil dari kelompok eks.karesidenan, BAKORLIN dan daerah kaya miskin yang kemudian didekomposisi ke dalam indeks ketidakmerataan antar dan intra kelompok serta analisa dinamis melalui *pooled data* ditemukan bahwa disparitas pendapatan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah dan mempunyai kecenderungan yang terus naik dari tahun ke tahun. Indeks entropi Theil yang rendah tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapatan yang terlalu jauh antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota masih dipandang relatif seimbang. Hasil estimasi dengan data panel melalui metode *random effect* menunjukkan bahwa faktor kesenjangan pendapatan, migrasi keluar dan pengeluaran pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang positif signifikan bagi pertumbuhan

ekonomi regional, sebaliknya inflasi regional mempunyai pengaruh yang negatif. Terdapat 14 kabupaten/ kota yang pertumbuhan ekonominya lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah, sedang 21 kabupaten/kota lainnya mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Berbeda dengan penelitian Noegroho dan Soelistianingsih (2007) tentang 'Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional dengan metode *random effect*, maka dalam tesis akan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta. Metode estimasi yang digunakan *fixed effect*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kotamadya/ kabupaten sebanyak 6 daerah dalam kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2002 sampai dengan 2007.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah kotamadya/ kabupaten dalam bidang pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengaruh jumlah tenaga kerja dan investasi di daerah kotamadya/ kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini diharapkan pengaruh pengeluaran pemerintah kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta dalam bidang pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan, tenaga kerja serta investasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Model

Berdasarkan kajian-kajian teoritis sebelumnya maka studi yang dilakukan dalam tesis ini adalah mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah daerah kotamadya/kabupaten melalui pengeluaran APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya belanja pembangunan (belanja publik) Propinsi DKI Jakarta dibidang pendidikan dan PPMK terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi DKI Jakarta. Model ekonometri yang digunakan merupakan modifikasi model dari Noegroho dan Soelistianingsih (2007). Selanjutnya model ini disesuaikan dengan data dan kondisi perekonomian kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta.

Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pendidikan dan PPMK terhadap pertumbuhan ekonomi Kotamadya/ Kabupaten pada tahun t . Persamaan empirisnya adalah :

$$Pertumb_u = \alpha_1 + \beta_1 AngPDDK_u + \beta_2 AngPPMK_u + \beta_3 Naker_u + \beta_4 Invest_u + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana :

- Pertumb_{it} = Pertumbuhan Ekonomi Kotamadya/ Kabupaten pada tahun t
- AngPDDK_{it} = Pengeluaran Perkapita Pada Bidang Pendidikan Daerah Kota/ Kabupaten pada tahun t (dln ribuan Rp.)
- AngPPMK_{it} = Pengeluaran PerKapita Pada Bidang PPMK Daerah Kota/ Kab Pada tahun t (dln ribuan Rp.)
- Naker_{it} = Jumlah Tenaga Kerja di Kotamadya/ Kabupaten (dln ribuan) bila kabupaten
- Invest_{it} = Jumlah Investasi di Kotamadya/ Kabupaten (dln ribuan Rp.)

α	= <i>intercept</i>
β_1	= Slope pertumbuhan terhadap anggaran pendidikan
β_2	= Slope pertumbuhan terhadap anggaran PPMK
β_3	= Slope pertumbuhan terhadap tenaga kerja.
β_4	= Slope pertumbuhan terhadap Investasi
ε	= <i>Error term</i>
i	= 1, 2N, data cross section dalam hal ini Kotamadya/ Kabupaten
t	= 1, 2T, banyaknya deret waktu, dalam hal ini data tahunan

Adapun hipotesis yang dibangun dari model diatas adalah sebagai berikut :

1. Anggaran pendidikan digunakan sebagai proxi terhadap variabel pendidikan di dalam model sesuai dengan teori yang tergambar pada persamaan 2..3. Dimana bila anggaran pendidikan naik maka akan menyebabkan biaya sekolah menjadi murah sehingga net enrolment meningkat dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian bila pengeluaran pemerintah daerah kotamadya /kabupaten dibidang pendidikan naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari pengeluaran pemerintah daerah kotamadya/kabupaten dibidang pendidikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Bila pengeluaran pemerintah daerah kotamadya/ kabupaten dibidang PPMK naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran pemerintah daerah kotamadya/kabupaten dibidang PPMK terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi
3. Pengaruh variabel tenaga kerja dan investasi daerah kotamadya/ kabupaten naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik atau dengan kata lain dapat

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari jumlah tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

3.2. Deskripsi Variabel dan Data Penelitian

Sumber data serta definisi notasi variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Deskripsi Variabel dan Sumber Data

Notasi Variabel	Deskripsi	Sumber
Pertumb	Pertumbuhan PDRB riil kotamadya/ kabupaten pada tahun t	BPS Propinsi DKI
ANGPDDK	Pengeluaran perkapita pada bidang pendidikan daerah Kotamadya/ Kabupaten i pada tahun t (dlm ribuan Rp.)	APBD dan BPS Propinsi DKI
ANGPPMK	Pengeluaran perkapita pada bidang PPMK daerah kotamadya/kabupaten i pada tahun t (dlm ribuan Rp.)	APBD dan BPS Propinsi DKI
Naker	Jumlah Tenaga kerja dalam hal ini jumlah pekerja yang berusia 15 tahun yang bekerja di kotamadya/ kabupaten i pada tahun t (dalam satuam ribuan)	Sakernas BPS dan BPS propinsi DKI Jakarta
Invest	Investasi, dalam hal ini kredit modal kerja dan investasi riil yang disalurkan oleh bank yang beroperasi di kotamadya/ kabupaten i pada tahun t (dalam satuan ribuan Rp.)	SEKI Bank Indonesia

Data anggaran pendidikan adalah pengeluaran bidang pendidikan yang dilakukan oleh sudin pendidikan dasar dan sudin pendidikan menengah dan tinggi setiap kotamadya/kabupaten dari tahun 2002 sampai dengan 2007, anggaran PPMK adalah pengeluaran bidang kesejahteraan masyarakat pada bidang PPMK yang dilakukan oleh biro kesejahteraan masyarakat setiap kotamadya/kabupaten dari tahun 2002 sampai dengan 2007, tenaga kerja adalah jumlah pekerja yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu yang diperoleh dari sakernas BPS dan BPS Propinsi DKI dari tahun 2002 sampai dengan 2007, dan data investasi adalah posisi kredit rupiah dan valuta asing bank umum menurut daerah tingkat II, jenis valuta, jenis penggunaan dan sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek di Propinsi DKI Jakarta dari tahun 2002 sampai dengan 2007.

3.3. Metode Estimasi Model

Data panel merupakan set observasi yang terdiri dari beberapa individu pada periode tertentu, observasi tersebut merupakan pasangan Y_{it} dan X_{it} dimana i adalah individu, t adalah waktu dan j adalah variabel bebas.

Data panel merujuk pada kasus $T > 1$ dan $N > 1$, dimana T adalah observasi dan n adalah jumlah observasi. Dalam melakukan estimasi data panel observasi-observasi tersebut dikelompokkan terlebih dahulu baik itu berdasarkan *time series* maupun *cross section*. Selain harus memenuhi asumsi klasik seperti nonautokorelasi, homokedastisity, dan nonmultikolinerity, juga terdapat asumsi tambahan untuk regresi data panel. Asumsi tambahan tersebut adalah 1) tidak ada hubungan antar individu i ; 2) α_{it} dan ϵ_{it} bersifat independen; 3) ϵ_{it} tidak berkorelasi dengan X_{it} .

Jika semua asumsi tersebut dapat terpenuhi maka asumsi metode OLS dapat digunakan untuk panel data dengan *pooled estimation*. Namun kesulitan yang dihadapi dengan menggunakan metode *pooled estimation* adalah bahwa asumsi *intercept* dan *slope* yang konstan mungkin tidak masuk akal. Sehingga sebagai alternatif dapat digunakan beberapa metode yang dapat dilakukan antara lain *fixed effects* atau *random effects*. Oleh karena dengan metode *pooled estimation* ada kelemahan yang dihadapi seperti disebutkan diatas maka dapat digunakan salah satu dari dua metode alternatif tersebut.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membuat pilihan antara metode *fixed effects* dan *random effects*. Pertama perlu diperhatikan berapa jumlah T dan N. Ketika $T \rightarrow \infty$ dan N memiliki nilai tertentu maka parameter yang dihasilkan oleh *fixed effect* dan *random effects* akan sama. Untuk kasus tersebut parameter yang dihasilkan oleh *fixed effects* akan konsisten dan efisien, walaupun asumsi *random effects* berlaku.

Untuk kasus T yang besar dan N yang kecil maka kemungkinan perbedaan hasil estimasi antara *fixed effects* dan *random effects* tidak akan jauh berbeda, maka untuk kasus ini pilihan akan jatuh pada penggunaan *fixed effects* yang tentunya perhitungannya jauh lebih mudah daripada *random effects*. Namun apabila N lebih besar dan T yang lebih kecil maka parameter yang dihasilkan akan jauh berbeda dan permasalahan akan muncul jika asumsi *random effects* berlaku dan *fixed effects* tetap digunakan. Parameter yang dihasilkan tetap konsisten akan tetapi tidak lagi efisien. Oleh karena itu harus dilakukan uji lebih lanjut guna mengetahui yang metode manakah yang harus digunakan.

Menurut Herosobroto dan Ekananda (2007) tahapan prosedur analisa panel data dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Melakukan uji F atau Uji Chow dengan tujuan untuk melihat apakah model lebih baik menggunakan pendekatan *Pooled Least Square* atau pendekatan dengan adanya efek individu. Adapun hipotesa yang dipergunakan untuk uji F adalah:

H_0 : *Pooled Least Square*

H_1 :Efek Individu.

Dengan ketentuan tolak H_0 Jika F_{stat} lebih besar dari F tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan digunakan adalah model *fixed effects* (FE), begitu juga sebaliknya. Dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut dengan menggunakan F Statistik seperti dirumuskan oleh Chow sebagai berikut :

$$\text{Chow} = \frac{(RRSS - URSS)/(N - 1)}{URSS / (NT - N - K)} \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana:

$RRSS$ = *Restricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *pooled least square/ common intercept*)

$URSS$ = *Unrestricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effects*)

N = Jumlah data *cross section*

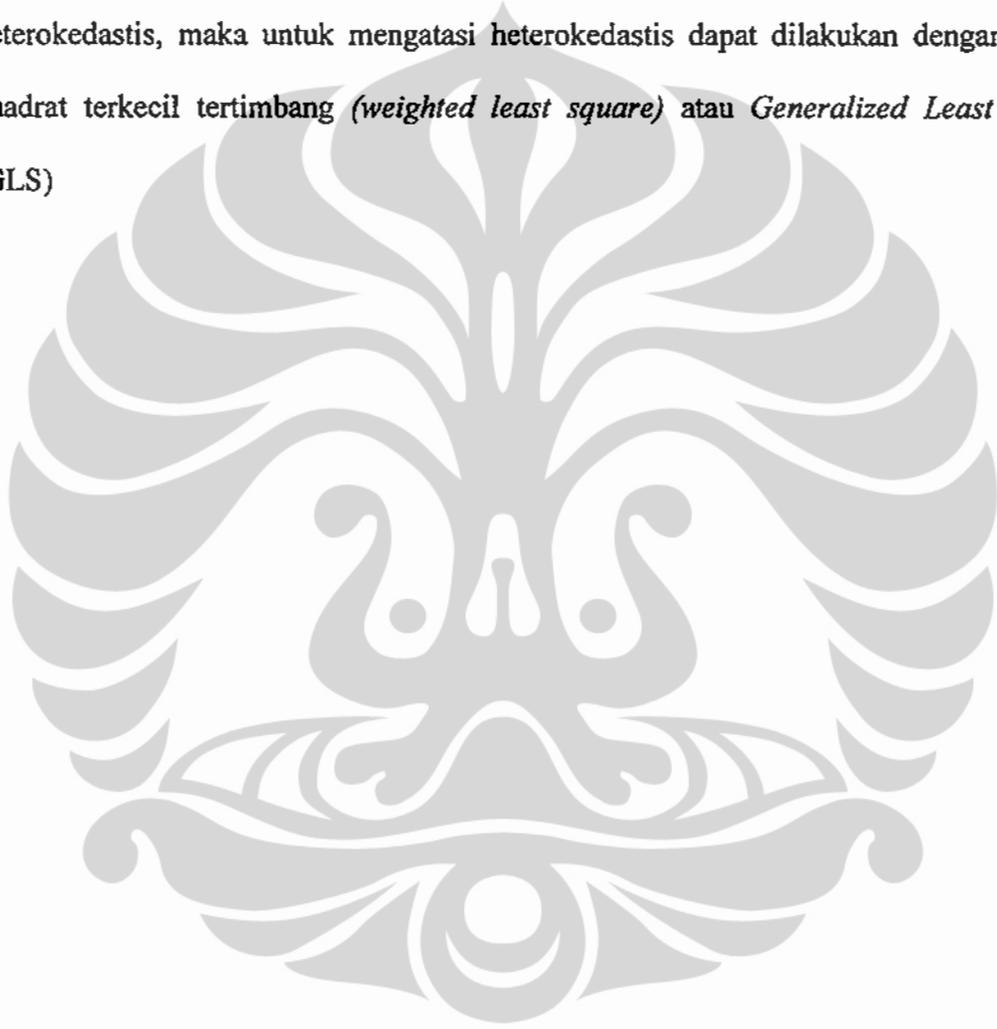
T = Jumlah data *time series*

K = Jumlah variabel bebas

2. Jika hasil uji F atau Uji Chow menunjukkan bahwa model menggunakan pendekatan efek individu, maka selanjutnya kita akan menentukan apakah efek tersebut merupakan

Fixed Effects (FE) atau *Random Effects (RE)*, dalam hal ini kita dapat menggunakan empat pendekatan. **Pertama**, jawabannya terpulang pada asumsi yang kita buat tentang korelasi antara *cross-section error component* u_i dan regressor X . Jika diasumsikan bahwa u_i dan regressor X adalah *uncorrelated*, maka RE lebih tepat. Namun jika diasumsikan bahwa u_i dan regressor X adalah *correlated*, maka FE lebih tepat. **Kedua**, jawabannya terpulang pada sampel penelitian kita RE mengasumsikan bahwa u_i diambil secara *random* dari populasi yang jauh lebih besar. **Ketiga**, selain dua prinsip utama diatas, terdapat beberapa pertimbangan teknis-empiris yang dapat dijadikan panduan untuk memilih antara *fixed effects* atau *random effects* yaitu: Bila T (jumlah unit *time series*) besar sedangkan N (jumlah unit *cross-section*) kecil, maka hasil *FE* dan *RE* tidak jauh berbeda. Dalam hal ini pilihan umumnya akan didasarkan pada kenyamanan penghitungan, yaitu FE. Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat berbeda secara signifikan. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka RE harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan FE. **Keempat**, keputusan penggunaan FE atau RE dapat pula ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausmann. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan nilai *Chi-Square Statistics* sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independent. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari pada nilai kritisnya atau hasil dari uji Hausman signifikan (*p-value* signifikan, maka H_0

ditolak, yang berarti model yang tepat adalah FE, sebaliknya apabila nilai statistik uji Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah RE. Jika hasil Uji Hausman menunjukkan adanya penggunaan FE, maka kita selanjutnya melakukan uji LM untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastis. Apabila dalam penelitian hasil estimasi model disimpulkan menggunakan model *fixed effects* serta terjadi heterokedastis, maka untuk mengatasi heterokedastis dapat dilakukan dengan model kuadrat terkecil tertimbang (*weighted least square*) atau *Generalized Least Square* (GLS)



BAB IV

HASIL REGRESI DAN ANALISIS

4.1. Perekonomian Jakarta

4.1.1. Struktur Perekonomian Jakarta

Perekonomian Jakarta yang digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku secara nominal dalam enam tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 299,97 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp 501,58 triliun pada tahun 2006. Demikian juga berlanjut pada tahun 2007, PDRB Propinsi Jakarta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 565,04 trilyun.

Perbandingan peranan antar sektor ekonomi pada kondisi harga berlaku tahun 2007 memiliki peranan sebesar 65,12 persen berasal dari tiga sektor utama. Masing-masing sektor ini memberikan kontribusi sebesar 28,72 persen untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sebesar 20,40 persen dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan 16,00 persen dari sektor industri pengolahan.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Bila pada tahun 2006 masing-masing memberikan kontribusi sebesar 20,07 persen, sebesar 8,80 persen, dan 12,58 persen maka pada tahun 2007 kontribusi meningkat menjadi 20,40 persen, sebesar 9,13 persen dan 12,90 persen. Sementara sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan menunjukkan pergerakan yang berbeda. Bila sebelumnya sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan menyumbang

29,80 persen, pada tahun 2007 turun menjadi 28,72 persen. Sementara sektor lainnya menunjukkan peranan yang relatif stabil. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Tahun 2002-2007 tersaji dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007 (Miliar Rp)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	440,0 (0,15)	367,3 (0,11)	403,0 (0,11)	438,2 (0,10)	490,5 (0,10)	566,85 (0,10)
2. Pertambangan	1.160,8 (0,39)	1.070,5 (0,32)	1.361,2 (0,36)	1.959,3 (0,45)	2.417,6 (0,48)	2.636,09 (0,47)
3. Industri Pengolahan	50.674,1 (16,89)	54.462,9 (16,29)	59.905,3 (15,95)	69.293,5 (15,88)	79.886,7 (15,93)	90.419,85 (16)
4. Listrik, Gas & Air Bersih	2.483,9 (0,83)	3.302,8 (0,99)	4.232,5 (1,13)	4.802,9 (1,10)	5.207,7 (1,04)	6.031,53 (1,07)
5. Bangunan	29.894,1 (9,97)	32.824,4 (9,82)	38.106,3 (10,15)	45.570,8 (10,45)	56.072,0 (11,18)	63.365,16 (11,21)
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	59.667,6 (19,89)	67.132,8 (20,06)	75.369,4 (20,07)	87.660,0 (20,09)	100.831, (20,09)	115.242,26 (20,40)
7. Pengangkutan & Komunikasi	20.360,2 (6,79)	24.198,7 (7,24)	28.325,9 (7,54)	35.477,7 (8,13)	43.006,8 (8,59)	51.607,49 (9,13)
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	98.128,3 (32,71)	108.503,0 (32,45)	119.578,5 (31,84)	136.624,6 (31,09)	149.469,5 (28,85)	162.300,92 (28,72)
9. Jasa-jasa	37.158,5 (12,39)	42.468,8 (12,70)	48.279,5 (12,86)	55.423,5 (12,70)	63.073,3 (12,58)	72.870,56 (12,90)
Produk Domestik Regional Bruto	299.967,6 (100)	334.331,3 (100)	375.561,5 (100)	436.250,7 (100)	500.755,1 (100)	565.040,72 (100)
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	298.806,8 (96,61)	333.260,8 (99,68)	374.200,3 (99,64)	434.291,4 (99,55)	498.337,4 (99,52)	562.611,04 (99,57)

Sumber : BPS Propinsi DKI Jakarta

Ket : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap PDRB

Dari sisi penggunaan, dalam kurun waktu 2002-2007, PDRB DKI Jakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor komponen permintaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor-impor. Tinjauan struktur PDRB menurut penggunaan menunjukkan alokasi penggunaan PDRB yang tercipta disuatu daerah pada satu kurun waktu tertentu. Selama tahun 2002 sekitar 50,92 persen PDRB DKI Jakarta digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nir laba, atau senilai Rp. 152,74 trilyun. Sementara selama tahun 2006 sekitar 53,67 persen PDRB DKI Jakarta digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nir laba, atau senilai Rp. 269,22 trilyun, sedang pada tahun 2007 proporsinya naik menjadi 55,97 persen atau senilai Rp. 316,28 trilyun. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut penggunaan tahun 2002-2007 tersaji dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga berlaku Menurut
Penggunaan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007 (Miliar Rp)**

Lapangan Usaha (1)	2002 (2)	2003 (3)	2004 (4)	2005 (5)	2006 (6)	2007
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga & Lembaga swasta nirlaba	155.424,7 (51,82)	173.200,3 (51,80)	195.360,1 (52,09)	229.624,1 (52,63)	269.212,0 (53,67)	316.280,43 (55,97)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.986,1 (5,00)	17.186,8 (5,14)	19.477,0 (5,19)	23.258,0 (5,33)	28.512,6 (5,29)	33.261,26 (5,89)
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	104.668,9 (34,89)	110.171,4 (32,95)	133.648,7 (35,59)	160.133,3 (36,70)	187.946,2 (35,76)	212.338,11 (37,58)
5. Perubahan Stok	-32.024,3 (-10,68)	-1.061,0 (-0,32)	-18.642,6 (-4,96)	-28.105,6 (-6,44)	-53.407,0 (-10,03)	-5.370,3 (-3,82)
6. Ekspor Barang dan Jasa	179.454,1 (59,82)	186.011,8 (55,64)	233.963,6 (62,30)	286.748,4 (65,73)	290.796,53 (64,98)	320.180,95 (60,49)
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	122.546,9 (40,85)	151.177,9 (45,22)	188.245,3 (50,12)	235.387,7 (53,96)	242.709,67 (48,39)	304.578,27 (53,90)
Produk Domestik Regional Bruto	299.967,6 (100,00)	334.331,3 (100,00)	375.561,5 (100,00)	436.250,7 (100,00)	500.755,1 (100,00)	565.040,72 (100)

Sumber : BPS Propinsi DKI Jakarta

Ket : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap PDRB

4.1.2. Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto bila dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah yang bersangkutan akan menghasilkan nilai PDRB per kapita yang menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama enam tahun mengalami

kenaikan, yakni dari Rp 35,30 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 57,17 juta pada tahun 2006, serta pada tahun 2007 Rp. 64,11 juta.

PDRB per kapita Propinsi DKI Jakarta dari tahun 2002 – 2007 secara rinci tersaji dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3
PDRB Perkapita dan Perubahan PDRB Perkapita
Propinsi DKI Jakarta, Tahun 2002-2007

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)		Perubahan PDRB Per Kapita (%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2002	35.302.766	29.461.122	12,85	4,06
2003	39.028.670	30.774.575	10,55	4,46
2004	43.487.399	32.251.227	11,42	4,80
2005	50.146.067	33.940.678	15,31	5,24
2006	57.286.659	35.715.169	14,24	5,18
2007	64.107.184	37.745.723	11,91	5,69

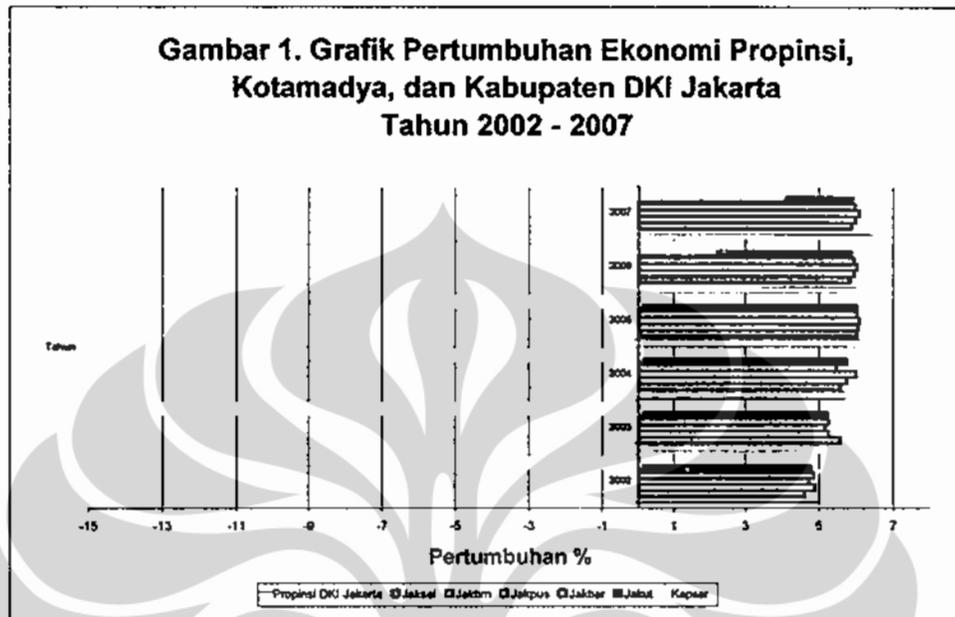
Sumber : BPS Propinsi DKI Jakarta

4.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Berdasarkan laporan kinerja pembangunan Jakarta tahun 2007 ditingkat propinsi umumnya terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat kotamadya/kabupaten ada beberapa kotamadya /kabupaten yang secara individual juga mengalami fluktuasi. Namun secara umum mengalami kenaikan pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat, jadi pertumbuhan ekonomi dapat mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian suatu daerah. Berikut disajikan perkembangan pertumbuhan

ekonomi tingkat Propinsi DKI Jakarta dalam Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2002 – 2007

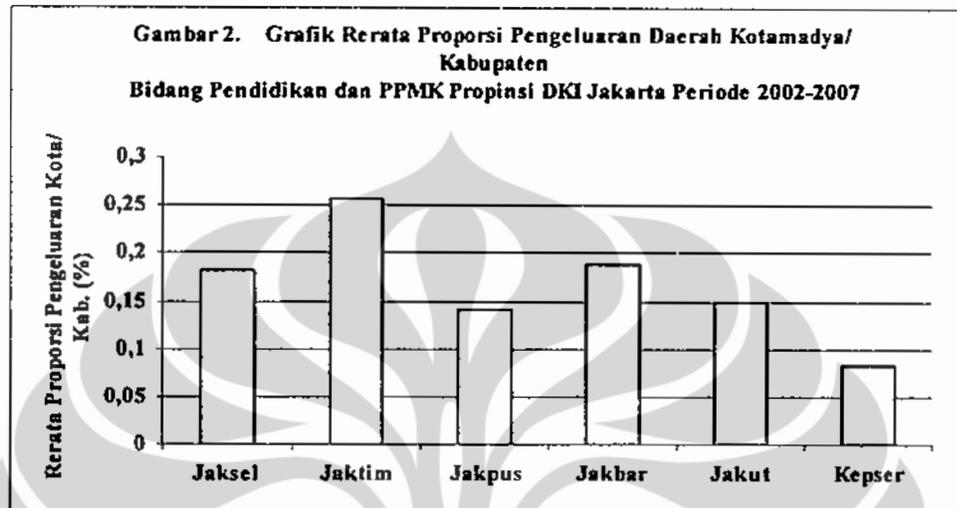


Sumber : BPS Propinsi DKI Jakarta

4.2. Realisasi Pengeluaran Pembangunan/ Sektor Publik Pemerintah Daerah Kotamadya/ Kabupaten pada Bidang Pendidikan dan PPMK

Sebelum melakukan regresi, maka akan terlebih dahulu ditunjukkan pengeluaran pembangunan pemerintah dalam bidang pendidikan dan PPMK. Hal ini penting dilakukan karena pengeluaran pemerintah relatif penting berperan dalam sektor perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Dar and Amir Khalkhail (2002). Pengeluaran pemerintah daerah yang tidak efisien tidak akan memperbaiki produktivitas perekonomian daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang tidak produktif, maka semakin besar pengurangan tingkat pertumbuhan ekonomi Wibisono (2005). Adapun rata-rata proporsi pengeluaran pembangunan pemerintah kotamadya/ kabupaten

di Propinsi DKI Jakarta dalam bidang pendidikan dan PPMK tersaji dalam Gambar 2. Grafik Rerata Proporsi Pengeluaran daerah Kotamadya/ Kabupaten Bidang Pendidikan dan PPMK Propinsi DKI Jakarta periode 2002 – 2007



Sumber : BPS Propinsi DKI Jakarta

Gambar 2. di atas memperlihatkan rerata proporsi pengeluaran bidang pendidikan dan PPMK daerah kotamadya/ kabupaten terhadap rerata total pengeluaran pemerintah daerah kotamadya/ kabupaten pada periode 2002 – 2007. Terlihat bahwa proporsi pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan PPMK mempunyai rata-rata 8,3 persen (Kabupaten Kepulauan Seribu) sampai dengan 25,6 persen (Kotamadya Jakarta Timur), serta rata-rata keseluruhan sebesar 16,7 persen. Anaman (2004) dalam Nugroho dan Soelistianingsih (2007) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan

ekonomi. Tetapi umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

4.3. Deskripsi Statistik dari Variabel Variabel dalam Model.

Gambaran statistik dari variabel-variabel di dalam model disajikan dalam Tabel

4.4. berikut :

Tabel 4.4 Deskripsi Statistik Variabel – variabel dalam Model

Variabel	Jumlah Sampel	Rerata	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi
Pertumbuhan	36	3,79	- 14,11	5,73	4,253
AngPDDK	36	75931,68	3556,71	315289,46	87087,85
AngPPMK	36	26443,62	1061,13	65000,00	20594,29
Naker	36	580,78	6,00	925,53	313,73
Invest	36	24315025,24	653076,91	70090298,64	19567008,43

Sumber : Diolah sendiri dari data sekunder

Dari tabel 4.1. terlihat rerata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian ini.

4.4. Hasil Pengujian Model

Pengujian model dilakukan dengan menggunakan data panel yang meliputi 6 kotamadya/ kabupaten di propinsi DKI Jakarta dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Eviews 4.1, mula-

mula dilakukan pengujian dengan metode *fixed effects* untuk data panel di atas. Hasil pengujian dengan uji Chow atau uji Fstat dijelaskan pada bagian berikut

1) Uji Chow atau Uji F

Untuk mengetahui ada tidaknya efek individual dari 6 kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta dalam pertumbuhan ekonomi regional, maka dilakukan uji statistik untuk membandingkan nilai R^2 dari metode *Pooled Least Square (PLS)* dan metode *Fixed effects*. Hal ini dilakukan untuk menentukan metode mana yang akan dipilih untuk estimasi data. pengujian dilakukan dengan uji Chow atau uji F. Setelah dilakukan penghitungan dengan pilihan *common dan fixed effects*, maka diperoleh hasil dalam tabel 4.5

Tabel 4.5. Hasil Uji Chow

Model	$R^2_{(PLS)}$	$R^2_{(FE)}$	F_{stat}	F_{Tab} $\alpha_{(0,05)}$	Hipotesis $H_0 = PLS$	Kesimpulan
Perumbuhan ekonomi (Model 1)	0,561813	0,901450	N = 6 T = 6 K = 4 Fstat = 18,44852	2,59	$H_0 = \text{Tolak}$	Efek Individu

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian untuk model pertumbuhan ekonomi memberikan hasil F stat lebih besar dari F tabel dimana nilai F statistik 18,44852 dan F tabel 2,59, atau H_0 yang merupakan tidak terdapat efek individu ditolak artinya terjadi efek individu dalam model pertumbuhan ekonomi dengan beberapa variabel bebasnya. Dengan demikian spesifikasi model yang akan dibuat akan mempunyai intersep yang bervariasi terhadap

individu namun tetap mengasumsikan bahwa slope koefisien adalah konstan antar individu kotamadya/ kabupaten.

2) Uji Hausmann

Untuk menentukan secara tepat spesifikasi model yang akan digunakan apakah metode *fixed effects (FE)* atau *random effect (RE)* maka dilakukan uji Hausmann. Hal ini dilakukan untuk menguji model yang paling baik digunakan dalam mengestimasi model pertumbuhan ekonomi tersebut. Uji Hausmann dapat memberikan penilaian dengan menggunakan Chi square statistik sehingga keputusan pemilihan model dapat ditentukan secara benar. Hasil uji Hausmann dapat disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil Uji Hausmann

Model	Uji Hausmann X^2_{hitung}	$X^2_{tabel (0,05)}$	Hipotesis $H_0 = RE$	Kesimpulan
Pertumbuhan ekonomi	237,82416	7,81473	$H_0 = \text{Tolak}$	Fixed effect

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji Hausman dapat disimpulkan bahwa estimasi model pertumbuhan ekonomi pada model dengan menggunakan metode *fixed effects (FE)* karena $H_0 : RE$ ditolak dimana X^2_{hitung} 237,82416 lebih besar dari pada X^2_{tabel} 7,81473 dengan $\alpha = 5 \%$.

3) Uji LM atau Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji LM (Lagrange Multiplier) yang bertujuan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas bahwa variabel sampel

tidak bias. Pengujian ini perlu dilakukan karena hasil pemilihan pada model menggunakan metode *fixed effects* dimana dalam *fixed effects* intersep antar individu berbeda namun intersep tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu. Selain itu pada metode *fixed effects (FE)* juga diasumsikan adanya korelasi antar *cross section error* dengan *regresors* (variabel X). Maka langkah selanjutnya dilakukan uji LM (Lagrange Multiplier) untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas pada metode estimasi. Hasil uji LM dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Hasil Uji LM (Lagrange Multiplier)

Model	Uji LM X^2_{hitung}	$X^2_{tabel (0,05)}$	Hipotesis $H_0 =$ Homokedastik	Kesimpulan
Pertumbuhan ekonomi (Model 1)	17,014495	11,0705	$H_0 =$ Tolak	heterokedastis

Sumber : Data diolah

Dari hasil uji LM menunjukkan nilai X^2 hitung adalah 17,014495 lebih besar dari pada Chi square tabel 11,0705 sehingga disimpulkan adanya heterokedastis pada model, untuk menghilangkan heteroskedastis maka estimasi model dengan metode *fixed effect* menggunakan prosedur weighting yaitu dengan *Cross Section Weight*.

4.5. Hasil analisis Regresi Kotamadya/ kabupaten

Berdasarkan regresi yang telah dilakukan terhadap data panel pengeluaran perkapita dalam bidang pendidikan, PPMK, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode *fixed effects* melalui prosedur regresi terhadap Model diperoleh hasil seperti tersaji pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 Hasil Regresi Model dengan Metode Fixed Effects

No.	Variabel Bebas	Koefisien	Standar error	Probabilitas
1.	AngPDDK	0,047643	0,019648	0,0226**
2.	AngPPMK	0,020646	0,001330	0,0000*
3.	Naker	0,032111	0,002135	0,0000*
4.	Invest	0,019277	0,002713	0,0000*
Fixed Effects _JAKSEL--C -12.89930, _JAKTIM--C -15.92183, _JAKPUS--C -6.075468, _JAKBAR--C -14.01050, _JAKUT--C -9.971417, _KEPSE--C -8.838460. $R^2 = 0,9362$ Adjusted R-squared = 0,9140 F- Statistik = 42,3674				
* Signifikan pada $\alpha = 1\%$ ** Signifikan pada $\alpha = 5\%$ *** Signifikan pada $\alpha = 10\%$				

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil estimasi yang tertera pada tabel 4.8 di atas, model memiliki kemampuan untuk menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi akibat variabel-variabel bebas (AngPDDK, AngPPMK, Naker, Invest) sebesar 93,62 persen. Artinya 7,38 persen variabel pertumbuhan ekonomi dijelaskan variabel lain diluar model. Dari hasil estimasi menggunakan metode *fixed effect* variabel anggaran pendidikan (AngPDDK) secara sistematis terbukti berpengaruh secara signifikan dan pengaruhnya positif pada tingkat keyakinan 95 persen terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian kenaikan anggaran pendidikan, dengan asumsi variabel yang lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini dapat

diartikan, jika anggaran pendidikan naik Rp. 1000 maka akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,05 persen. Hal ini telah diduga sebelumnya bahwa apabila anggaran pendidikan meningkat maka *Net Enrolment Ratio* sekolah dasar meningkat sehingga terjadi peningkatan kemampuan sumber daya manusia, selanjutnya pendapatan meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat

Variabel anggaran PPMK (AngPPMK) juga berpengaruh secara signifikan dan pengaruhnya positif pada tingkat keyakinan 99 persen. Dengan demikian kenaikan anggaran PPMK, dengan asumsi variabel yang lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini dapat diartikan, jika anggaran PPMK naik Rp. 1000, maka akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,02 persen. Hal ini juga telah diduga sebelumnya, bahwa apabila anggaran PPMK meningkat maka masyarakat yang menerima bantuan akan segera melakukan kegiatan produktif, karena PPMK merupakan bantuan langsung kepada masyarakat kelurahan sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat menurunkan tingkat kemiskinan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

Variabel Tenaga kerja (Naker) kotamadya/ kabupaten berpengaruh secara signifikan dan pengaruhnya positif pada tingkat signifikansi 99 persen. Dengan demikian kenaikan jumlah tenaga kerja, dengan asumsi variabel yang lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini dapat diartikan, jika jumlah tenaga kerja naik 1000 tenaga kerja maka akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,03 persen.. Hal ini juga telah diduga sebelumnya, bahwa apabila jumlah tenaga kerja meningkat maka meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

Variabel Investasi (Invest) juga berpengaruh secara signifikan dan pengaruhnya positif pada tingkat keyakinan 99 persen. Dengan demikian kenaikan investasi, dengan asumsi variabel yang lain tetap (*ceteris paribus*), maka akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini dapat diartikan, jika investasi naik Rp. 1000, maka akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,02 persen. Hal ini juga telah diduga sebelumnya, bahwa apabila investasi meningkat maka akan membuka lapangan kerja baru sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

Dari hasil estimasi dengan model di atas diperoleh hasil rata-rata pertumbuhan ekonomi regional terbesar ditingkat kotamadya/ kabupaten Propinsi DKI Jakarta ditunjukkan oleh Kotamadya Jakarta Pusat, dan terendah Kotamadya Jakarta Timur. Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi data panel dengan metode *fixed effectss* berikut.:

Estimation Command:

EST(F,W,H,M=500,C=0.0001) PERTUMB? ANGPDDK? ANGPPMK? NAKER? INVEST?

Estimation Equations:

PERTUMB_JAKSEL = C(5) + C(1)*ANGPDDK_JAKSEL + C(2)*ANGPPMK_JAKSEL + C(3)*NAKER_JAKSEL + C(4)*INVEST_JAKSEL

PERTUMB_JAKTIM = C(6) + C(1)*ANGPDDK_JAKTIM + C(2)*ANGPPMK_JAKTIM + C(3)*NAKER_JAKTIM + C(4)*INVEST_JAKTIM

PERTUMB_JAKPUS = C(7) + C(1)*ANGPDDK_JAKPUS + C(2)*ANGPPMK_JAKPUS + C(3)*NAKER_JAKPUS + C(4)*INVEST_JAKPUS

PERTUMB_JAKBAR = C(8) + C(1)*ANGPDDK_JAKBAR + C(2)*ANGPPMK_JAKBAR + C(3)*NAKER_JAKBAR + C(4)*INVEST_JAKBAR

PERTUMB_JAKUT = C(9) + C(1)*ANGPDDK_JAKUT + C(2)*ANGPPMK_JAKUT + C(3)*NAKER_JAKUT + C(4)*INVEST_JAKUT

PERTUMB_KEPSEK = C(10) + C(1)*ANGPDDK_KEPSEK + C(2)*ANGPPMK_KEPSEK + C(3)*NAKER_KEPSEK + C(4)*INVEST_KEPSEK

Substituted Coefficients:

$$\text{PERTUMB_JAKSEL} = -12.89929657 + 0.04764323222 * \text{ANGPDDK_JAKSEL} + 0.02064627662 * \text{ANGPPMK_JAKSEL} + 0.02796536199 * \text{NAKER_JAKSEL} + 0.01910562312 * \text{INVEST_JAKSEL}$$

$$\text{PERTUMB_JAKTIM} = -15.92182652 + 0.04764323222 * \text{ANGPDDK_JAKTIM} + 0.02064627662 * \text{ANGPPMK_JAKTIM} + 0.02796536199 * \text{NAKER_JAKTIM} + 0.01910562312 * \text{INVEST_JAKTIM}$$

$$\text{PERTUMB_JAKPUS} = -6.075467901 + 0.04764323222 * \text{ANGPDDK_JAKPUS} + 0.02064627662 * \text{ANGPPMK_JAKPUS} + 0.02796536199 * \text{NAKER_JAKPUS} + 0.01910562312 * \text{INVEST_JAKPUS}$$

$$\text{PERTUMB_JAKBAR} = -14.01049585 + 0.04764323222 * \text{ANGPDDK_JAKBAR} + 0.02064627662 * \text{ANGPPMK_JAKBAR} + 0.02796536199 * \text{NAKER_JAKBAR} + 0.01910562312 * \text{INVEST_JAKBAR}$$

$$\text{PERTUMB_JAKUT} = -9.971417126 + 0.04764323222 * \text{ANGPDDK_JAKUT} + 0.02064627662 * \text{ANGPPMK_JAKUT} + 0.02796536199 * \text{NAKER_JAKUT} + 0.01910562312 * \text{INVEST_JAKUT}$$

$$\text{PERTUMB_KEPSER} = -8.8384599 + 0.04764323222 * \text{ANGPDDK_KEPSER} + 0.02064627662 * \text{ANGPPMK_KEPSER} + 0.02796536199 * \text{NAKER_KEPSER} + 0.01910562312 * \text{INVEST_KEPSER}$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari pengeluaran pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Adapun besarnya pengaruh pengeluaran pendidikan adalah 0,05 persen, yang berarti setiap terjadi peningkatan pengeluaran pendidikan perkapita sebesar Rp.1000 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 persen, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari pengeluaran PPMK yang dilakukan pemerintah daerah kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Adapun pengaruh pengeluaran PPMK adalah 0,02 persen yang berarti setiap terjadi peningkatan pengeluaran PPMK perkapita sebesar Rp. 1000, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari jumlah tenaga kerja yang di wilayah kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Adapun pengaruh jumlah tenaga kerja adalah 0,03 persen, yang berarti setiap terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1000 tenaga

kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

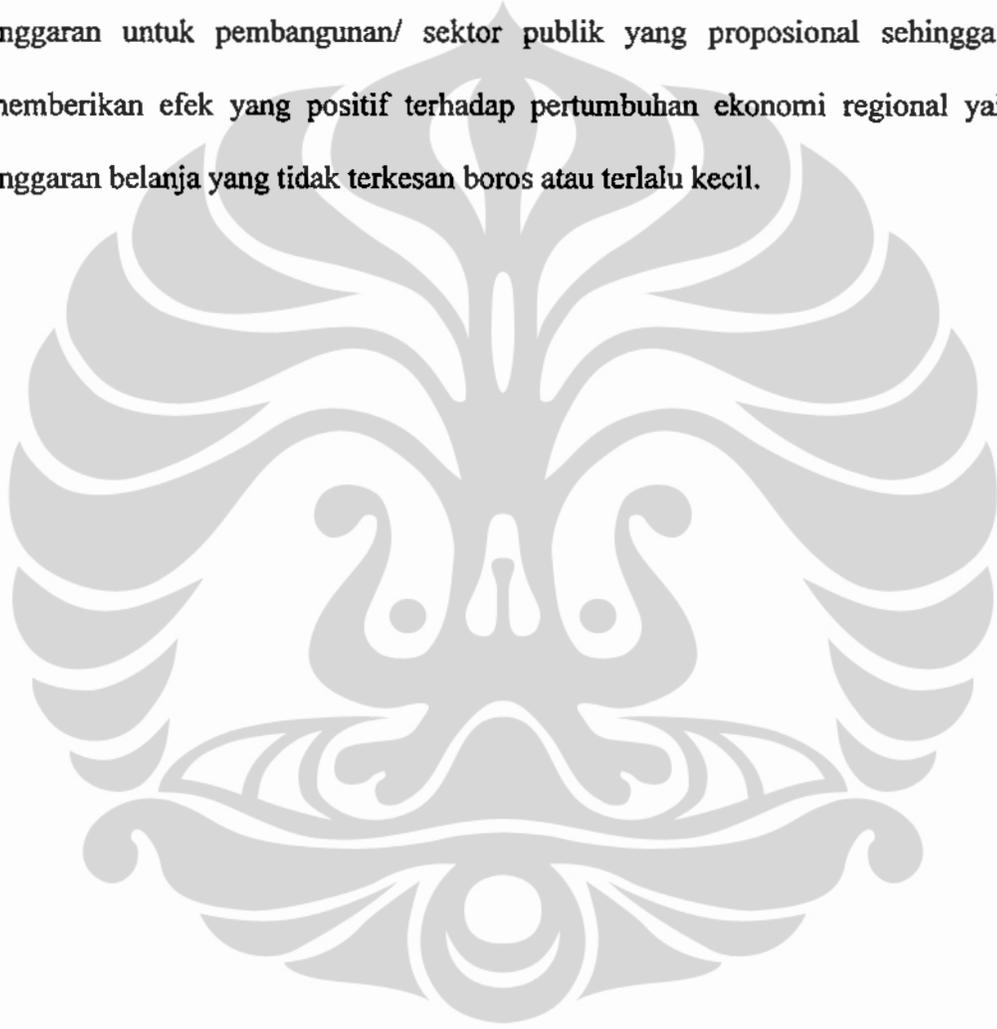
4. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari jumlah investasi di wilayah kotamadya/ kabupaten di Propinsi DKI Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Adapun pengaruh investasi adalah 0,02 persen, yang berarti setiap terjadi peningkatan investasi sebesar Rp. 1000 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

5.2. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya. Pertama ketersediaan data perlu ditambah dengan data yang lebih banyak baik dari runtun waktu maupun *cross section*. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh pengeluaran Pendidikan dan PPMK (pengeluaran sektor publik bidang kesejahteraan masyarakat) terhadap pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. Pengeluaran bidang pendidikan sebenarnya baru berdampak setelah beberapa tahun. Dengan data yang rentang waktunya yang lebih panjang sehingga dapat dilihat hasilnya dalam jangka panjang, misalnya pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap *Net Enrolment Ratio* sekolah dasar.

Kedua, perlu ditambahkan variabel-variabel kontrol yang dapat menghitung pengaruh pengeluaran pendidikan dan PPMK, seperti tingkat melek huruf penduduk diatas usia 10 tahun, lama rata-rata sekolah, untuk indikator pengeluaran pendidikan. Sedangkan untuk indikator pengeluaran PPMK dapat ditambahkan variabel kontrol seperti jumlah keluarga penerima dana, jumlah penduduk miskin, dan sebagainya.

Dari penelitian diatas terbukti bahwa pengeluaran bidang pendidikan dan PPMK mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karenanya perlu diperhatikan pengelolaan anggaran pendidikan dan PPMK tersebut agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Disamping itu pemerintah daerah kotamadya/ kabupaten diharapkan mampu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan/ sektor publik yang proposional sehingga mampu memberikan efek yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu suatu anggaran belanja yang tidak terkesan boros atau terlalu kecil.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, 1999. *Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE UGM..
- Barro, Robert J. "Human Capital and Economic Growth".1991, *Quarterly Journal of Economics*
- Baskoro, J. Cahyo. 2004. *Studi Tentang Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya Pada Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Propinsi di Indonesia.. Tesis S2 Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi. FE-UI.*
- Berlian, Nur. 2006. *Studi Hubungan Timbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Perekonomian di Indonesia. Tesis S2 Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi. FE-UI.*
- Boediono. 1982. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Brata, A.G, dan Z. Arifin. "Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia". *Media ekonomi* 13 (20), 2003, hal 59-71
- Brata, A. G, 2004. *Komposisi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
- Brown, Donald. 1995. "*Poverty-Growth Dichotomy*". Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Chambers, Robert. 1995, *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Dar, A.A. and S. Amir Khakhali, 2002. "Government size, factor accumulation, and economic growth :evidence from OECD countries", *Journal of Policy Modeling* 24, 679 - 692.
- Dornbusch, Rudiger dan Fischer, Stanley. 1997. *Ekonomi Makro Edisi 5*. Jakarta, Rineka Cipta.

- Friedman, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Garcia, J. G, dan L. Soelistianingsih. "Why Do Defference in Provincial Income Persist in Indonesia?". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 34, No.1, April 1988, pp. 95-120.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics 4th Ed*. New York: McGraw-Hill.
- Gupta, S, B. Clemments, E. Baldacci, dan C. Mulas-Gramados. "Expenditure Comopition, Fiscal Adjustment, and Growth.". IMF Working Paper: 02/77, 2002.
- Halim, A. 2001. *Analisis deskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. Yogyakarta: KOMPAK STIE YO
- Herosobroto dan M. Ekananda. "Analisis Dampak Depresiasi dan Volatilitas Nilai Tukar Terhadap Kinerja Ekspor Kayu Olahhan Indonesia". Working Paper, Universitas Indonesia, 2007.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1995. *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kuncoro, M. 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan. Jakarta: Prisma 4: 3-17.
- Mankiw N Gregory. 2003. *Macroeconomics, Fifth Editions*. New York: Worth Publishers, 41 Madison Avenue.
- Nachrowi, Nachrowi J. dan Usman, Hardius. 2006. *Ekonometrika. Pendekatan Populer dan Praktis dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data dengan SPSS dan Eviews*. Jakarta : Lembaga penerbit Universitas Indonesia.
- Noegroho, S. Yoenanto dan L. Soelistianingsih. "Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional". Working Paper, Universitas Indonesia, 2007.
- Pyndick, Robert S, dan Daniel L Rubinfeld. 1998. *Econometric Models and Economic Forecasts 4th Edition*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Rahayu, U. Dwi. 2005. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tesis S2 Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi. FE-UI
- Romer, David. 1996. *Advanced Macroeconomics*. New York: Mc-Graw-Hill.

Sekretariat Negara RI. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Indonesia.

_____. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah. Jakarta, Indonesia.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Todaro, Michael P. 1985. *Economic Development Report in the Third World*. New York: Oxford University Press.

UNDP. 1990. *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.

_____. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.

Wibisono, Yusuf.. "Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia 1984 – 2000". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. V, No. 02, Januari, 2005.

Widodo, Hg. Suseno Triyono. 1991. *Indikator ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius..

World Bank. 2002. Linking Policy, Planning and budgeting in a Medium-Term Framework. World Bank Public Expenditure Management Handbook 1998. USA: Georgia State.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Syntax Program Eviews untuk Uji Hausman

Syntax Program hausman Test

(Untuk menentukan model random effect atau fixed effect)

```
pertumb.ls(F) pertumb? angpddk? angppmk? tk? invest?  
vector beta=pertumb.@coefs  
matrix covar=pertumb.@cov  
vector b_fixed=@subextract(beta,1,1,4,1)  
matrix cov_fixed=@subextract(covar,1,1,4,4)  
pertumb.ls(R) pertumb? angpddk? angppmk? tk? invest?  
vector beta=pertumb.@coefs  
matrix covar=pertumb.@cov  
vector b_gls=@subextract(beta,2,1,5,1)  
matrix cov_gls=@subextract(covar,2,2,5,5)  
matrix b_diff=b_fixed - b_gls  
matrix v_diff=cov_fixed - cov_gls  
matrix h=@transpose(b_diff)*@inverse(v_diff)*b_diff
```

Lampiran 2. Syntax Program Eviews untuk Uji LM

Syntax Program LM Test
(Untuk pemilihan estimator hetrokedastik dan homokedastik)

```
pertumb.makesresid(n=residual)
scalar T=pertumb.@regobs
scalar n=pertumb.@ncross
matrix residm = residual
matrix rescov = (@transpose(residm)*residm)/T
vector rescovd = @getmaindiagonal(rescov)
scalar ssr =pertumb.@ssr
vector LM1 = (rescovd/ssr-1)
vector qform = (@transpose(LM1) * LM1)*T/2

if qform(1,1)>=0 then
  ' set table to store results
  table(4,2) result
  setcolwidth(result,1,20)
  setcell(result,1,1,"LM test for hetero versus homo")
  setline(result,2)

  !df=n-1
  setcell(result,3,1,"chi-sqr(" +@str(!df) + ") = ")
  setcell(result,3,2,qform(1,1))
  setcell(result,4,1,"p-value = ")
  setcell(result,4,2,1-@cchisq(qform(1,1),!df))
  setline(result,5)

  show result
else
  statusline "Quadratic form is negative"
endif
```

Lampiran 3. Output Regresi Persamaan Pertumbuhan Ekonomi dengan Model Fixed Effect (weigted)

Dependent Variable: PERTUMB?
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 07/11/08 Time: 10:44
 Sample: 2002 2007
 Included observations: 6
 Number of cross-sections used: 6
 Total panel (balanced) observations: 36
 One-step weighting matrix

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ANGPDDK?	0.047643	0.019648	2.424867	0.0226
ANGPPMK?	0.020646	0.001330	15.52041	0.0000
NAKER?	0.027965	0.002135	13.09875	0.0000
INVEST?	0.019106	0.002713	7.042304	0.0000
Fixed Effects				
_JAKSEL-C	-12.89930			
_JAKTIM-C	-15.92183			
_JAKPUS-C	-6.075468			
_JAKBAR-C	-14.01050			
_JAKUT-C	-9.971417			
_KEPSER-C	-8.838460			

Weighted Statistics

R-squared	0.936166	Mean dependent var	3.819468
Adjusted R-squared	0.914070	S.D. dependent var	2.140231
S.E. of regression	0.627384	Sum squared resid	10.23387
F-statistic	42.36754	Durbin-Watson stat	1.600997
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.900491	Mean dependent var	3.500000
Adjusted R-squared	0.866046	S.D. dependent var	1.732051
S.E. of regression	0.633926	Sum squared resid	10.44840
Durbin-Watson stat	1.562857		

Lampiran 4. Output Regresi Persamaan Pertumbuhan Ekonomi dengan Model Fixed Effect

Dependent Variable: PERTUMB?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 07/11/08 Time: 10:43
 Sample: 2002 2007
 Included observations: 6
 Number of cross-sections used: 6
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ANGPDDK?	0.050271	0.046103	1.090420	0.2855
ANGPPMK?	0.021297	0.002165	9.837086	0.0000
NAKER?	0.028950	0.003718	7.785994	0.0000
INVEST?	0.017134	0.004114	4.164750	0.0003
Fixed Effects				
_JAKSEL-C	-11.47832			
_JAKTIM-C	-14.19403			
_JAKPUS-C	-5.420004			
_JAKBAR-C	-12.43693			
_JAKUT-C	-8.858495			
_KEPSEK-C	-9.214321			
R-squared	0.901450	Mean dependent var	3.500000	
Adjusted R-squared	0.867336	S.D. dependent var	1.732051	
S.E. of regression	0.630866	Sum squared resid	10.34780	
F-statistic	26.42491	Durbin-Watson stat	1.485055	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5. Output Regresi Persamaan Pertumbuhan Ekonomi dengan Model Pooled Least Square

Dependent Variable: PERTUMB?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 07/11/08 Time: 10:40
 Sample: 2002 2007
 Included observations: 6
 Number of cross-sections used: 6
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.964454	0.940620	-1.025339	0.3131
ANGPDDK?	0.288510	0.072804	3.962853	0.0004
ANGPPMK?	0.011779	0.002361	4.988794	0.0000
NAKER?	0.010710	0.004328	2.474662	0.0190
INVEST?	0.002813	0.001137	2.474035	0.0190
R-squared	0.551813	Mean dependent var	3.500000	
Adjusted R-squared	0.493982	S.D. dependent var	1.732051	
S.E. of regression	1.232093	Sum squared resid	47.05965	
F-statistic	9.541883	Durbin-Watson stat	0.732584	
Prob(F-statistic)	0.000038			

Lampiran 6

Tabel Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DKI Jakarta, Tahun 2002-2006.

Tingkat Pendidikan Tertinggi	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
tidak/belum pernah sekolah/belum tamatan SD	10,28	11,62	12,03	12,84	11,91
SD	23,01	21,02	20,29	22,47	20,88
SMTp	20,83	22,44	21,53	20,48	19,65
SMTA	33,92	36,62	36,15	33,33	35,23
D1-D3/Akademi	5,28	3,79	4,46	4,15	4,75
Universitas/S1/S2	6,68	4,51	5,53	5,73	7,58
Jumlah	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00

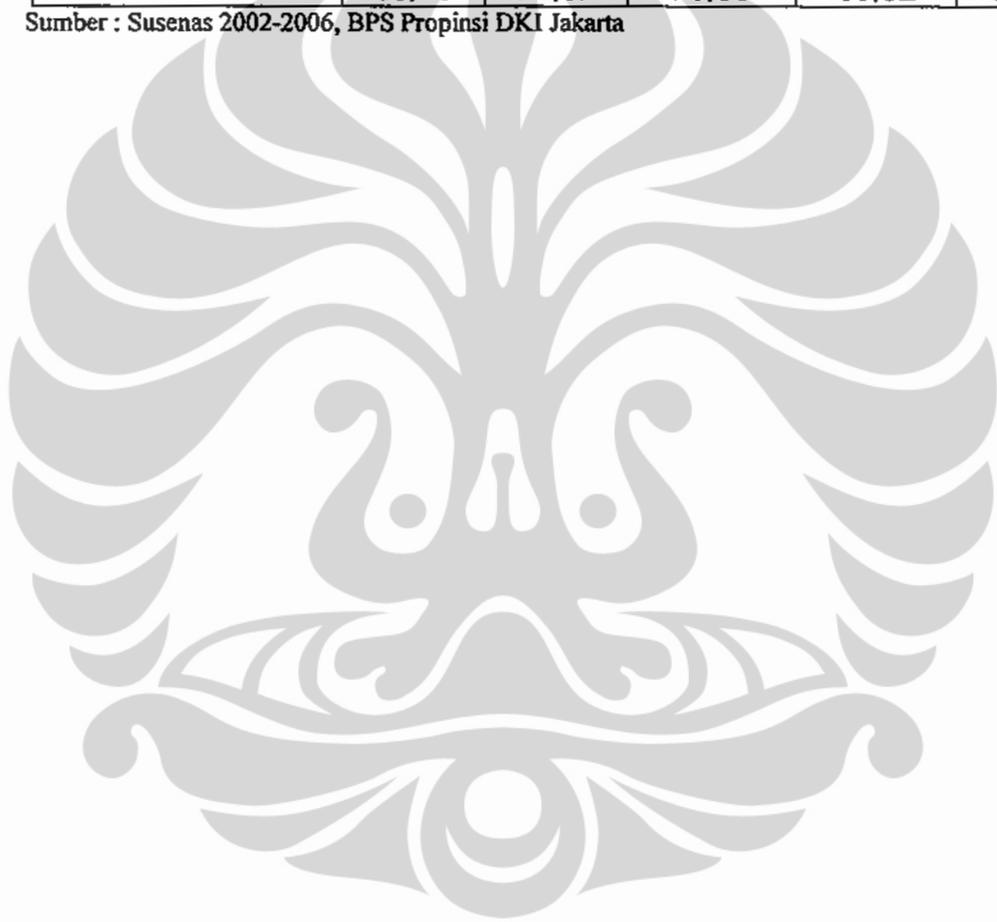
Sumber : Susenas 2002-2006, BPS Propinsi DKI Jakarta.

Lampiran 7

**Tabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia
Sekolah di DKI Jakarta, Tahun 2002-2006 (Persen)**

Kelompok Usia	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Usia 7 – 12 tahun	97,63	98,21	98,40	97,99	98,46
Usia 13 – 15 tahun	92,24	91,81	92,63	92,00	90,16
Usia 16 – 18 tahun	68,26	71,57	70,36	60,82	60,28

Sumber : Susenas 2002-2006, BPS Propinsi DKI Jakarta



Lampiran 8

